

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
SEBAGAI KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang)**



**PUPUT NANDA SARI
NIM. 2011150131**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
TAHUN 2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) SEBAGAI KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
TAHUN 2024**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pugar Dewa Kota Bengkulu

Telepon: (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website www.uinfbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Puput Nanda Sari**, NIM 2011150131

dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil**

(PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Perspektif Siyasaah Dusturiah (Studi Desa Kuto Rejo Kecamatan

Kepahiang Kabupaten Kepahiang)" Program Studi Hukum Tata

Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai

dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu,

skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2024

BENGKULU

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muinudin, S.I.P., M.AP

A. Majid Ali, M.Si

NIP. 196806051988031003

NIP. 196504011986021007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon: (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi disusun Oleh Puput Nanda Sari, NIM : 2011150131
yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Desa Kuto Rejo Kecamatan
Kepahiang Kabupaten Kepahiang)"**
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah
diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Oktober 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam
Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 01 Oktober 2024 M
1445 H



Dekan
Prof. Dr. Suwatjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua Sekretaris

Dr. Miinudin, S.I.P, M.AP
NIP. 196806051988031003

A. Majid Ali, M.Si
NIP. 196504011986021007

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, S.Ag, MA
NIP. 197103201996031001

Dr. Zacky Antoni, SH, MH
NIP. 2005037702

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan shalawat salam atas Rasulullah SAW penulis haturkan. Tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil alamin dengan mengucap rasa syukur sebanyak-banyaknya, penulis telah melewati suka duka selama menyelesaikan tugas akhir ini sebagai mahasiswa. Oleh, karena itu dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda, Junaidi dan Umi Sahada orang tua yang hebat yang selalu menjadi penyemangat, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberi motivasi, serta dukungan moral maupun materi. Teima kasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Berkat do'a dan dukungan dari ayahanda dan ibunda penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ayahanda dan ibunda. Semoga Allah SWT selalu menjaga ayahanda dan ibunda dalam kebaikan dan kemudahan.
2. Kakakku dan adikku terkasih, Lusiana, Yulia Fitri Yanti, Indah Puspita Sari, Alexi Indri Yani Dan Alexa Hendri Yanto, terima kasih sudah ikut serta dalam prosesku menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepadaku.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan,

semangat, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan

4. Sahabatku Vitha Vionita dan Amelia Astuti terima kasih telah memberikan semangat melalui celotehannya, karena itu semua adalah bentuk dukungan dan motivasi. Terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaikku sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabatku Meva Para Sari, Fheli Permata Sari dan Jamilatun Shafitri, terima kasih telah menemani, membantu, dan selalu mendengarkan keluh kesahku dalam pengerjaan skripsi ini. Serta sahabatku IDM (Rahmatika, Annisa, Wawa, Zikri, Deko, Anggun, Shinta, Aufa) terima kasih atas dukungannya sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Dosen pembimbingku Bapak Dr. Miinudin, M. Kes Dan Bapak A. Majid Ali, M. Si terima kasih telah memberi kritik, saran dan arahan serta memberikan masukan untuk skripsiku.
7. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaan selama menempuh kuliah.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan seluruh civitas akademi di kampus tercinta Prodi HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "**Analisis yuridis terhadap pegawai negeri sipil sebagai ketua badan permusyawaratan Desa perspektif siyasah dusturiah (studi Desa kuto rejo kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang)**". Aladdin asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipa secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2024

Mahasiswa yang menyatakan,

Puput Nanda Sari
NIM. 2011150131



ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Siyasah Dustiryah (Studi Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”, Oleh: Puput Nanda Sari, NIM. 2011150131, Pembimbing I: Dr. Miinudin, S.Ip., M.Ip. dan Pembimbing II: A. Majid Ali, M.Si.

Ada dua persoalan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang) dan 2) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Siyasah Dustriyah (Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan. Lokasi penelitian diambil yaitu: Desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang, Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Kantor Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, sedangkan informan penelitian ini adalah warga desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang, Camat Kabupaten Kepahiang, Kepala Desa Kuto Rejo, anggota BPD desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang dan tokoh agama. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Dan hasil penelitian ini adalah 1) Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjabat sebagai anggota atau ketua Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun terdapat persyaratan pencalonan yang melarang rangkap jabatan, Pegawai Negeri Sipil tidak disebut secara eksplisit. Namun, dalam ketentuan Pegawai Negeri Sipil sendiri, aturan tentang rangkap jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN) mengharuskan Pegawai Negeri Sipil untuk menjaga integritas, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Meskipun Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tidak melarang Aparatur Sipil Negara untuk menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa, aturan Aparatur Sipil Negara yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan terkait disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil melarang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan rangkap jabatan. 2) Dalam konteks rangkap jabatan, siyasah dusturiyah yang membahas perundang-undangan dan pengambilan keputusan terkait kelembagaan peradilan tidak secara khusus melarang rangkap jabatan, terutama jika dilihat dari perspektif masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi, tidak ada peraturan yang melarang seseorang mengemban lebih dari satu jabatan, dan beberapa sahabat Nabi juga diketahui memegang beberapa posisi sekaligus.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Badan Permusyawaratan Desa, Siyasah Dusturiyah



ABSTRACT

Thesis with the title "Judicial Analysis of Civil Servants (PNS) as Chair of the Village Consultative Body (BPD) Siyasa Dustiryah Perspective (Study of Kuto Rejo Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency)", by: Puput Nanda Sari, NIM. 2011150131, Supervisor I: Dr. Miinudin, S.Ip., M.Ip. and Supervisor II: A. Majid Ali, M.Si.

There are two issues discussed in this research, namely: 1) How is the Juridical Analysis of Civil Servants (PNS) as Chair of the Village Consultative Body (BPD) (Case Study in Kuto Rejo Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency) and 2) How is the Analysis Jurisdiction Against Civil Servants (PNS) as Chair of the Village Consultative Body (BPD) Siyasa Dustiryah Perspective (Case Study in Kuto Rejo Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency). The research method used in this research is field research, namely collecting data directly in the field. The research locations were taken: Kuto Rejo Village, Kepahiang Regency, Village Consultative Body (BPD) Office, Kuto Rejo Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency, and Kepahiang Regency Government Office, while the informants for this research were residents of Kuto Rejo Village, Kepahiang Regency, the Head of the Kepahiang Regency Subdistrict, the Head of Kuto Village. Rejo, member of BPD Kuto Rejo village, Kepahiang Regency and religious figure. Data collection techniques used interviews. And the results of this research are 1) Kepahiang Regent Regulation Number 24 of 2018 concerning the Village Consultative Body (BPD) does not prohibit Civil Servants (PNS) from serving as members or chairs of the BPD. Even though there are candidacy requirements that prohibit holding multiple positions, civil servants are not mentioned explicitly. However, in terms of civil servant regulations themselves, the rules regarding multiple positions are regulated in Government Regulation Number 11 of 2017 and then updated through Government Regulation Number 17 of 2020, which no longer regulates dual positions specifically. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) requires civil servants to maintain integrity, honesty, trustworthiness and

responsibility. In this case, civil servants are expected to avoid situations that could compromise the principles of their professionalism. Even though Village Law Number 6 of 2014 does not prohibit ASN from being chairman of the BPD, higher ASN regulations, such as Law Number 5 of 2014 concerning ASN and various regulations related to civil servant discipline and code of ethics prohibit civil servants from holding concurrent positions. 2) In the context of holding multiple positions, *siyasah dusturiyah* which discusses legislation and decision making related to judicial institutions does not specifically prohibit holding multiple positions, especially when viewed from the perspective of the time of the Prophet Muhammad SAW. During the time of the Prophet, there were no regulations prohibiting someone from holding more than one position, and several of the Prophet's companions were also known to hold several positions at once.

Keywords: Civil Servants, Village Consultative Body, *Siyasah Dustiruyah*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Siyasa Dustiryah (Studi Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan

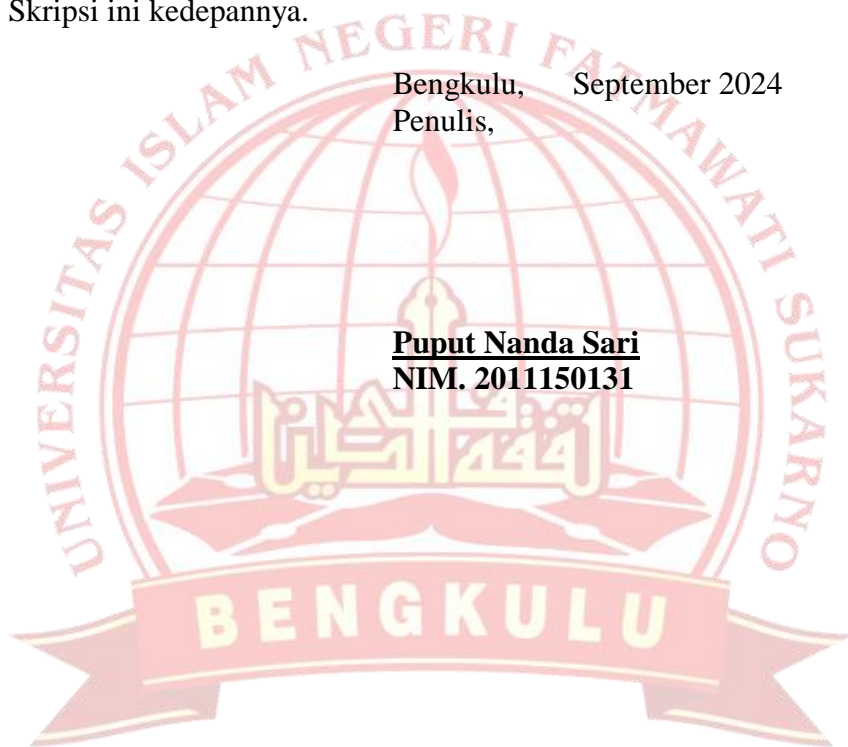
fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Miinudin, S.Ip., M.Ip. selaku Pembimbing I dan A. Majid Ali, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, September 2024
Penulis,

Puput Nanda Sari
NIM. 2011150131



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Penelitian Terdahulu | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)..... | 17 |
| B. Badan Pemusyawaratan Desa | 25 |
| C. Siyasah Dusturiyah..... | 33 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | |
| A. Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu | 39 |
| B. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rejang Lebong | 39 |
| C. Badan Permusyawaratan Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang | 42 |
| BAB IV HASIL PENELLITIAN DAN PEMBAHASAN | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang)..... | 44 |
| B. Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Siyasa Dustriyah (Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang) | 57 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

